KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kongres nasional IAKMI, DPR: pastikan yankes dapat diakses seluruh masyarakat
Tanggal : Sabtu, 31 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kongres Nasional IAKMI

DPR: Pastikan Yankes Dapat Diakses Seluruh Masyarakat

Senayan mendorong transformasi sistem kesehatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas dan pengobatan, tapi juga memperkuat upaya pencegahan penyakit. Pastikan juga pelayanan kesehatan (Yankes) berkualitas dapat diakses seluruh masyarakat.

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mengatakan, kesehatan merupakan hak dasar warga negara sekaligus fondasi penting dalam pembangunan nasional. Karena itu, negara perlu memastikan setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil untuk hidup sehat, tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.

"Kita perlu memperkuat sistem yang mampu mencegah masyarakat jatuh sakit, mendeteksi risiko kesehatan sejak dini, dan memastikan layanan kesehatan yang berkualitas tersedia secara merata," ujar Putih dalam acara Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dengan tema "Kolaborasi untuk Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan dan Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Asta Cita di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Putih menilai, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang membutuhkan penanganan serius. Mulai dari penyakit menular dan tidak menular, persoalan gizi dan stunting, kesehatan ibu dan anak, hingga kesenjangan akses pelayanan kesehatan.

"Belum lagi persoalan keterbatasan tenaga kesehatan di sejumlah wilayah serta dampak perubahan iklim yang turut memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat," ucap politisi Gerindra ini.

Di sisi lain, lanjut Putih, transformasi digital kesehatan juga menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memperkuat sistem kesehatan nasional. Berbagai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah fasilitas pengobatan.

Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat pendekatan promotif atau peningkatan kesehatan dan preventif atau pencegahan. Tujuannya agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sebelum terserang penyakit.

Menurutnya, pendekatan kesehatan masyarakat sangat fundamental. Kesehatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis, tetapi juga oleh lingkungan tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, pola konsumsi, sanitasi, perilaku, serta kondisi sosial dan ekonomi. "Jadi kesehatan masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap program Pemerintah," tandas dia.

Dia mengingatkan, persoalan kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah, DPR, BPJS Kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dan masyarakat. Karena itu, kebijakan di bidang kesehatan perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pendidikan, pangan, lingkungan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah. "Seluruh unsur harus bekerja dalam satu arah dan saling memperkuat," tandasnya.

Dia ingin, kolaborasi tidak boleh berhenti pada pertemuan atau kesepakatan formal, tetapi perlu diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Sementara DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan program kesehatan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BPJS Kesehatan, tambah dia, juga memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun perguruan tinggi diharapkan terus menghasilkan penelitian, inovasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

"Organisasi profesi juga perlu memastikan kompetensi, etika, dan kualitas tenaga profesional tetap terjaga," imbuh legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Putih menambahkan, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kesehatan. Karena masyarakat bukan semata-mata penerima manfaat, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik.

Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong tenaga kesehatan dan akademisi untuk mengubah paradigma pembangunan kesehatan nasional. Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan rumah sakit, obat-obatan, dan pengobatan ketika masyarakat sudah jatuh sakit. Upaya pencegahan penyakit harus menjadi prioritas.

"Penguatan kesehatan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan angka harapan hidup dan menekan beban pembiayaan kesehatan nasional yang terus meningkat," ujar Budi di Gedung DPR Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Budi menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem kesehatan yang lebih efektif dengan mengutamakan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit. Dengan itu, kalangan tenaga kesehatan masyarakat untuk lebih berani mengambil peran dalam transformasi sektor kesehatan Indonesia.

Kesempatan tersebut, kata dia, semakin terbuka karena Pemerintah mulai memperkuat program pemeriksaan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendeteksi penyakit sejak dini. Karena keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata diukur dari kemampuan rumah sakit mengobati pasien. "Yang lebih penting, bagaimana negara mampu menjaga masyarakat agar tidak jatuh sakit," imbuh Budi.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dedi Supratman meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin memperkuat posisi dan peran tenaga kesehatan masyarakat dalam sistem kesehatan nasional. Selama ini perhatian Pemerintah terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan masih perlu diperluas.

"Penguatan tenaga dokter dan pemberian beasiswa bagi tenaga medis memang penting, tetapi jangan sampai mengabaikan tenaga kesehatan masyarakat," ujar Dedi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Menurut Dedi, Indonesia membutuhkan tenaga kesehatan masyarakat yang kuat. Bila Pemerintah sungguh-sungguh ingin memperkuat komitmen terhadap upaya promotif dan preventif, maka pengembangan tenaga kesehatan masyarakat juga perlu menjadi prioritas. ■ TIF